BAB II

LANDASAN TEORI

A. Peranan

1. Pengertian Peranan

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi. Sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu. Sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.¹

Secara sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan diri lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.² Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peranan memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

¹ R. Sutyo Bakir, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Tangerang: Karisma Publishing Group, 2009, hlm.348

² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Rajawali Press, 2002, hlm 242

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peranan adalah suatu konsep perihal yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.³

2. Jenis-Jenis Peranan

Jenis-jenis peran adalah sebagai berikut :

- 1) Peranan normatif adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang dilakukan berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peran ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya didalam suatu sistem.
- 3) Peran faktual adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit dilapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

B. Tinjauan Umum Tentang Bank Indonesia

1. Sejarah Singkat Bank Indonesia

Tahun 1828, *De Javasche Bank* didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda sebagai Bank Sirkulasi yang bertugas mencetak dan mengedarkan uang. Tahun 1953, Undang-Undang Pokok Bank Indonesia (BI) untuk menggantikan fungsi *De Javasche Bank* sebagai Bank Sentral,

³ *Ibid.* Hlm. 242

dengan 3 (tiga) tugas utama di bidang moneter, perbankan, dan sistem pembayaran. Di samping itu, Bank Indonesia diberi tugas penting lain dalam hubungannya dengan Pemerintah dan melanjutkan fungsi Bank Komersial yang dilakukan oleh *De Javasche Bank* sebelumnya. Tahun 1968, Undang-Undang Bank Sentral mengatur kedudukan dan tugas Bank Indonesia sebagai Bank Sentral, terpisah dari bank-bank lain yang melakukan fungsi komersial. Selain 3 (tiga) tugas pokok Bank Sentral. Bank Indonesia juga bertugas membantu pemerintah sebagai agen pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat.⁴

Tahun 1999, babak baru dalam sejarah Bank Indonesia, sesuai dengan UU No. 23 Tahun 1999 yang menetapkan tujuan tunggal Bank Indonesia yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tahun 2004, Undang-Undang Bank Indonesia diamandemen dengan focus pada aspek penting yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia, termasuk penguatan *governance*. Tahun 2008, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PerPPU) No. 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas sistem keuangan. Amandemen dimaksudkan untuk meningkatkan ketahanan perbankan nasional dalam menghadapi krisis global melalui peningkatan akses perbankan terhadap fasilitas pembiayaan jangka pendek dari Bank Indonesia.

2. Tujuan dan Tugas Bank Indonesia

Tujuan Bank Indonesia

Bank Indonesia memiliki tujuan yang dimuat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia menyatakan bahwa ialah Tujuan Bank Indonesia

⁴ Rinsky k. Judisseno, *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*, (Gramedia Pustaka Utama 2002), hlm 35

adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah. Kestabilan nilai Rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu:⁵

- a. kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan/atau jasa
- b. kestabilan terhadap mata uang Negara lain

Perumusan tujuan tunggal dari Bank Indonesia dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapai atau tidaknya tujuan Bank Indonesia ini kelak akan dapat diukur dengan mudah. Kemudian untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia melakukan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konstiten, transparan dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian.

Tugas Bank Indonesia

Untuk mencapai tujuannya, Bank Indonesia memiliki tugas-tugas yang telah dimuat di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia menyatakan bahwa:⁶

- a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
- b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
- c. Mengatur dan mengawasi bank (sudah dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan)

⁵ <http://www.bi.go.id> di akses pada 5 Desember 2017

⁶ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

Dalam pelaksanaan tugas tersebut, pihak lain dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Kemudian tugas Bank Indonesia diuraikan sebagai berikut:⁷

- 1) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter yaitu :
- 2) Memperhatikan dan menetapkan laju inflasi
- 3) Melakukan pengendalian inflasi
- 4) Memberikan bantuan untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek bank-bank umum
- 5) Melakukan kebijakan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing
- 6) Melaksanakan pengelolaan cadangan devisa
- 7) Melaksanakan survei makro dan mikro
- 8) Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, yaitu :
- 9) Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran.
- 10) Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya
- 11) Menetapkan penggunaan alat pembayaran
- 12) Mengatur kliring antar bank dalam mata uang Rupiah dan/atau valuta asing

⁷Frianto Pandia, dkk, 2004, *Lembaga Keuangan*, PT Rineka Cipta, Jakarta. hlm.22.

3. Dasar Hukum Pengeluaran dan Penedaran uang

Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang

Menimbang : a. *bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat memiliki mata uang sebagai salah satu simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga Negara Indonesia.*